

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Anugerah yang telah dilaksanakan pada 16 April – 18 Mei 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Apoteker memiliki peran serta tanggung jawab yang besar atas seluruh rangkaian kegiatan di apotek.
2. Melatih kerja keterampilan, pengalaman serta dapat membuka wawasan bagi calon Apoteker untuk mengetahui melakukan praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
3. PKPA memberi gambaran nyata tentang permasalahan yang timbul dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di apotek, serta melatih kemampuan memecahkan masalah (*problem solving*) yang timbul saat menjalankan praktik pelayanan kefarmasian di apotek.

5.2 Saran

Calon Apoteker perlu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peran, tugas, dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek beserta meningkatkan rasa percaya diri bagi calon Apoteker untuk menjadi seorang Apoteker yang profesional di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Brayfield, A. 2014, *Martindale The Complete Drug Reference 38th Edition*, London: Pharmaceutical Press.
- British Medical Association, 2020, *British National Formulary for Children (BNFC) 2020-2021*, London: Royal Pharmaceutical Society.
- McEvoy, Gerald K, *et al.* 2011, *AHFS Drug Information*, American Society of Health-System Pharmacist, Maryland, USA.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia^a. 2021, *Pedoman Pengelolaan Obat Rusak dan Kedaluwarsa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Rumah Tangga*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia^a. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek*. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia^b. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

- Menteri Kesehatan Republik Indonesia^b. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia^b. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan*. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

Royal Pharmaceutical Society. 2022, *British National Formulary 83th Edition*, BMJ Publishing Group, London.